

## **BAB IV**

# **BERBAGAI PROGRAM KONRAD ADENAUER STIFTUNG DI FILIPINA (2010-2014)**

### **A. Program Penelitian dan Pendampingan KAS sebagai Think-Tank dan Consulting Agent**

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) yang merupakan yayasan politik, sebagian besar berperan aktif dalam program penelitian, yaitu sebagai Think-Tank atau lembaga peneliti, begitu pula dengan KAS cabang Filipina ini. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan tersebut, KAS menawarkan saran pada stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perdamaian di wilayah Mindanao, misalnya tentang bagaimana pemerintahan yang baik dan demokratis, ekonomi yang maju dan berkembang, serta keamanan yang terjaga .

Selain itu, KAS disini juga menjadi consulting agent dengan melakukan pendampingan serta konsultasi, dalam artian KAS membantu baik itu pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam membantu penyelesaian berbagai isu seperti isu politik, ekonomi, serta keamanan yang terjadi akibat konflik di Mindanao ini dengan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut dapat berupa dialog, diskusi, seminar, workshop, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini KAS

biasanya bekerja sama dengan partner mereka yang ada di Filipina, seperti NGO lokal atau institusi-institusi. Berikut merupakan contoh kegiatan KAS yang dibagi berdasarkan isu yang dihadapi dalam periode 2010-2014:

### 1. Politik

Ada beberapa hasil publikasi dan kegiatan dari KAS dalam isu politik di Filipina, terutama di Mindanao. Salah satu publikasi KAS adalah "*How to Govern after Winning on Election: a Guidepost*" yang ditulis oleh Gaudioso C. Sosmena, Jr.

Setelah memenangkan pemilu pada tahun 2010, pejabat lokal yang telah terpilih akan dihadapkan dengan realitas yang mengatur daerah mereka, yaitu dari menjamin kebijaksanaan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pemberdayaan setiap konstituen, hingga berbagai hambatan-hambatan lainnya. Maka dari itu, buku ini menguraikan berbagai bidang-bidang penting yang harus dilihat dan menjadi fokus pejabat terpilih tersebut agar dapat memerintah secara efektif. Mulai dari bidang partisipasi politik dan pengelolaan fiskal, pengukuran kinerja, akuntabilitas, hingga tentang harus melawan suap dan korupsi. Maka dari itu, penulis dan KAS tidak meragukan bahwa buku ini akan sangat berguna bagi pemerintah setempat, sebab mereka dapat menggunakan guidepost ini sebagai acuan. (Gaudioso C. Sosmena, 2010)

KAS, bekerja sama dengan Institute for Autonomy and Governance (IAG), juga melakukan penelitian dan publikasi *policy brief* atau kebijakan singkat yang mereka anggap baik dan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, terutama mengenai isu yang menyangkut ARMM atau Autonomous Region of Muslim Mindanao, seperti perdamaian, pemerintahan, pembangunan, otonomi, dan berbagai isu lain yang menentukan bagaimana nasib ARMM yang kemudian menjadi Bangsamoro kedepannya. Beberapa contoh publikasi *policy brief* ini antara lain, seperti: *Bangsamoro History and Quest for Future Status*, *ARMM at the Crossroad: Where to go?*, dan *Prospect for Peace Under the Aquino Administration*.

Selain penelitian dan publikasi, KAS juga melakukan beberapa seminar. Dalam seminar seminar tersebut, KAS berdialog, berdiskusi, dan memberikan saran kepada aktor-aktor yang terlibat agar tujuan bersama yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu seminar yang pernah dibuat oleh KAS adalah *Political Party Building Seminar: Ballots instead of Bullets*. Seminar ini dilakukan di Maguindanao, dimana perwalikan dari MILF atau *Moro Islamic Liberation Front* beserta komandan dari sayap bersenjataanya, *Bangsamoro Islamic Armed Force* (BIAF), hadir dalam seminar empat hari tersebut yang memiliki tujuan menawarkan kepada kelompok pemberontak agar dapat membentuk partai politik sendiri, dibandingkan dengan melakukan perlawanan.

Pada acara seminar yang diadakan di *Bangsamoro Management and Leadership Institute* (BMLI) di kota Sultan Kudarat di Provinsi Maguindanao ini juga mengundang para ahli dan spesialis untuk menyampaikan masukan seperti tentang politik nasional dan lokal, manajemen partai politik, sistem pemerintahan dengan fokus pada sistem parlementer, dan bentuk pemerintahan yang ditargetkan pemerintah untuk wilayah Bangsamoro yang dibayangkan oleh Filipina. (KAS, 2013)

## 2. Ekonomi

Dalam isu ekonomi, KAS melakukan berbagai penelitian tentang kondisi, masalah, serta solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut, KAS membuat berbagai kegiatan seperti workshop dan dialog.

Salah satu workshop yang dilakukan oleh KAS adalah *Workshop on social market economy corporate governance and the role of state in regulating national and international financial markets*. Workshop ini ditujukan untuk instansi pemerintah, lembaga swasta yang terkait, akademisi, dan media untuk membahas baik itu pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga pada saat ini mengenai tata kelola perusahaan di pasar keuangan.

Di dalam workshop tersebut, pihak KAS serta pembicara dari

pengalaman Uni Eropa, khususnya Republik Federal Jerman kepada kepala instansi pemerintah terkait dan lembaga swasta. Hal ini diharapkan agar Filipina dapat mengadopsi sistem yang sama, sebab menurut pengalaman ketika Eropa tidak luput dari krisis keuangan 2008/2009, ekonomi pasar sosial Jerman dapat bertahan dan dianggap berhasil.

Dalam ekonomi pasar sosial, aturan yang telah ditetapkan mengontrol pasar, sehingga menciptakan tatanan ekonomi yang lebih bisa diterima oleh stakeholder utama di kawasan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di Jerman, ekonomi pasar sosial menjadi faktor kuat yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Jerman. Selain itu perbedaan tingkat pendapatan di masyarakat Jerman relatif kecil dan bahwa perekonomian mereka dibangun di atas usaha kecil dan menengah, menekankan kekuatan kelas menengah.(KAS, 2010)

Kemudian, selain workshop, KAS juga membuat forum diskusi mengenai strategi mengurangi kemiskinan. Pada tanggal 15 Januari 2012, KAS mengumpulkan anggota Centrist Democratic Movement Federation of the Philippines (CDM) untuk melakukan dialog dengan Mr. Washington SyCip. Mr. Washington SyCip merupakan tokoh yang dikenal sebagai pengusaha Asia yang terkenal dan visioner. Bersama-sama dengan Dr. Jose Abueva, mantan Presiden Universitas Filipina, Mr Lito Monico Lorenzana, Presiden dari Centrist Democratic Politic Institute (CDPI), serta Country

Representative KAS saat itu, Dr Peter Koeppinger untuk berinteraksi dengan CDM, sebuah gerakan politik yang terdiri dari profesional muda yang memegang prinsi-prinsip demokrasi sentris.

Dialog difokuskan pada wawasan Mr. SyCip pada strategi pengentasan kemiskinan yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan Filipina. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan di Filipina adalah salah satu yang tertinggi di kawasannya.

Mr. Sycip percaya bahwa meskipun kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan pendidikan dan bentuk peningkatan pembangunan kapasitas individu dapat memungkinkan mereka untuk memperbaiki diri, keluarga, dan komunitas mereka. Maka dari itu, kualitas pendidikan di Filipina, terutama Mindanao harus ditingkatkan. (KAS, 2012)

### **3. Keamanan**

Dalam isu keamanan, salah satu bentuk kegiatan KAS adalah bekerjasama dengan IAG dalam publikasi *Security Sector Transformation Praxis from The Ground* yang berbicara tentang hambatan dalam sektor transformasi keamanan di Filipina, rekomendasi kebijakan pada pemerintahan Aquino, bagaimana pentingnya menciptakan lingkungan yang aman untuk pihak yang

berkonflik, serta membangun partnership. (Institute for Autonomy and Governance (IAG), 2010)

KAS bersama IAG juga membuat suatu forum diskusi mengenai *Security Sector Transformation: Conceptual and Analytical Framework*. Dalam forum ini, KAS dan IAG mengundang beberapa tokoh untuk membicarakan mengenai sektor keamanan di Mindanao, seperti Kepala Komando Mindanao bagian timur, Lt. Gen. Raymundo Ferrer yang berbicara tentang DDR (*Disarmament, Demobilization, and Reintegration*) dan SSR (*Security Sector Reform*) di Mindanao. Selain itu ada pula pakar keamanan nasional, Rommel Banlaoi yang menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi sektor keamanan di Filipina.

## **B. Program Indigenous People Development**

Program *Indigenous People Development* atau dengan lebih lengkapnya adalah *Recognition of the Rights of the Indigenous Peoples in the Autonomous Region in Muslim Mindanao for their Empowerment and Sustainable Development* (IPDEV) adalah merupakan proyek yang didanai oleh Uni Eropa tentang hak-hak masyarakat asli.

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) di Filipina dengan bangga mengumumkan peluncuran program ini pada Februari 2012. Bersama dengan Institute for Autonomy and Governance (IAG) dan Development Consultants Inc. (DEVCON), Konrad Adenauer Stiftung akan

melaksanakan proyek ini di lima provinsi, yaitu Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan dan Tawi-Tawi di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) dan Lanao del Norte. Dalam waktu tiga tahun, tim proyek akan bekerja terhadap perlindungan dan promosi hak-hak masyarakat asli atau indigenous People (IP) di ARMM.(KAS Press Release, 2012)

Sebenarnya pada tahun 1997, The Indigenous Peoples Rights Act telah diperkenalkan untuk memberikan hak-hak dasar seperti wilayah leluhur, integritas budaya, self-governance dan pemberdayaan, serta keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi penduduk IP di Filipina. Namun pada kenyataannya, kelompok etnis yang terpinggirkan di ARMM belum dapat sepenuhnya menikmati dan melaksanakan hak-hak dasar dalam IPRA ini.

Sebenarnya, baik Moro maupun masyarakat asli non-muslim di wilayah tersebut dapat dianggap sebagai pribumi. Namun, dari waktu ke waktu dengan penyebaran Islam di wilayah ini, identitas agama dan budaya mereka terpisah. Saat ini, umat Islam umumnya disebut sebagai "Moro", sedangkan masyarakat asli non-muslim dan non-kristen mengacu pada Lumad. Dengan perbedaan ini, populasi IP semakin sering diabaikan, terutama ketika membicarakan konflik Mindanao. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi masyarakat yang paling terpinggirkan di Negeri tersebut



Secara keseluruhan di Filipina, masyarakat asli atau indigenous people (IP) terdiri dari sekitar sepuluh sampai dua belas juta jiwa, yang berarti sekitar 10% dari penduduk Filipina. Dari jumlah tersebut, diperkirakan setengah juta hidup di ARMM, yang berarti sekitar 15% dari populasi di ARMM tersebut. Akan tetapi masyarakat asli yang non-muslim di ARMM ini tidak mendapatkan hak-hak mereka, tidak bisa mendapatkan akses ke pelayanan sosial dan kesehatan, serta tidak mendapat andil dalam proses pengambilan keputusan politik. Sementara IP di bagian negara lain di Filipina bisa menikmati hasil dari IPRA tersebut, namun hukum ini tidak berlaku di ARMM karena status otonom. Sehingga di ARMM mereka benar-benar ditinggalkan tanpa hukum, tak terlihat, tak terwakili, dan diabaikan. (Fischer & Bacani, 2013)

Maka dari itu, melalui program IPDEV ini, kegiatan mereka akan berfokus pada peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan dan penguatan IP di pemerintahan itu sendiri, serta advokasi untuk reformasi sosio-legal dan administrasi di ARMM. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah pengembangan masyarakat IP di ARMM agar mengakui hak-hak minoritas di semua tingkatan dan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat yang terpinggirkan. Proyek ini bertujuan pula untuk meningkatkan kesadaran dalam struktur politik dan administrasi yang selama ini diskriminatif agar tidak lagi meninggalkan setengah juta IP di posisi yang terpinggirkan dan tidak setara di hadapan hukum.

Hingga sekarang tim proyek IPDEV ini telah menunjukkan tanda keberhasilan dalam perlindungan dan promosi hak-hak masyarakat asli di ARMM. Untuk pertama kalinya, proyek IPDEV mampu membuat suara mereka terdengar dan kepentingan IP tidak akan lagi dibiarkan karena telah dianggap sebagai entitas politik baru yang muncul dalam perundingan perdamaian yang sedang berlangsung antara pemerintah Filipina dan MILF. Hal ini terbukti dari terpilihnya seorang wakil dari tim proyek IPDEV sebagai anggota *Transition Commition* (TC), yaitu Ms Froilyn Mendoza. TC inilah yang kemudian akan menentukan Undang-Undang Dasar di Bangsamoro.

### **C. Program Pendidikan**

Selain politik dan ekonomi, KAS juga sangat peduli tentang pendidikan, terutama pengetahuan mengenai politik, kewarganegaraan, demokrasi, perdamaian, dan lain-lain. Hal ini di harapkan agar pengetahuan masyarakat, terutama anak-anak muda atau para siswa agar dapat lebih mengerti tentang isu-isu ini. Dengan memiliki pengetahuan lebih tentang isu-isu tersebut, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dikemudian hari, seperti partisipasi politik yang meningkat, derajat kehidupan yang lebih baik, perdamaian yang terjaga, dan sebagainya. Maka dari itu KAS sangat aktif dalam berkontribusi untuk memberikan pengetahuan dalam dunia pendidikan di Filipina. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KAS dalam hal ini yaitu seperti...

perkuliahan di beberapa universitas di Filipina. Salah satunya adalah lecture series di kota Davao, Filipina.(KAS, 2010)

Selama tiga hari perkuliahan pada 25 – 27 Januari 2010 ini disponsori oleh Philippine Council for Islam and Democracy (PCID) dan KAS, serta bekerjasama dengan Ateneo De Davao University dan University of the Philippines-Mindanao. Proyek lecture series ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kaum muda dalam isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan Demokrasi. Pada perkuliahan di hari pertama, materi yang dibawakan adalah mengenai *Women's Reproductive Health: a Path for Gender Development* oleh Prof. Datin Rashidah Shuib, yang merupakan profesor dan direktur pusat penelitian dan pengembangan perempuan di University Sains Malaysia. Anggota Ateneo Moro Youth Organization dan mahasiswa lain dari berbagai universitas menghadiri perkuliahan ini.

Pada hari kedua, kuliah umum ini dilanjutkan di University of Filipina-Mindanao, dengan pembicara DR Amany Lubis dari Nahdlatul Ulama di Indonesia. Beliau membahas mengenai peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan nasional. Perwakilan dari kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia yang berbasis di Davao juga turut hadir dalam perkuliahan ini.

Sedangkan pada hari terakhir merupakan perkuliahan mengenai politik dan agama, dengan pembicara Dr. Imam Addaruquthni, Ketua Komite Dakwah Muhammadiyah dan Anggota Parlemen di Indonesia.

Beliau membahas tentang kewarganegaraan dan demokrasi dalam konteks agama dan negara, serta konsistensi dalam mengejar kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Beliau juga menyatakan bahwa proses menyatukan politik dan agama di Indonesia sudah cukup berhasil, Filipina pun juga mampu untuk menciptakan ini dengan cara dan model mereka sendiri.(KAS, 2010)

Selain Islam and Democracy Lecture Series tersebut, KAS juga mengadakan perkuliahan umum tentang *Promotion of Peace and Tolerance, and Understanding between Religions and Cultures* yang diadakan pada 1 September 2010 di University of the Philippines Diliman Campus dengan pembicara Mr. Ikebal Patel, President of the Australian Federation of Islamic Councils. Perkuliahan ini dirancang untuk memperluas pendukung dalam perdamaian dan demokrasi di Mindanao dengan melibatkan masyarakat umum, akademisi, serta pembuat kebijakan non-Muslim dalam pembahasan isu-isu yang mempengaruhi umat Islam dan bangsa.(KAS, 2010)

Selain mengadakan berbagai perkuliahan, KAS juga mengadakan konvensi, yaitu *9<sup>th</sup> Young Economists Convention Tackles Recovery, Development and Social Market Economy*. Sebuah konvensi yang memungkinkan siswa ekonomi di seluruh negeri untuk mengasosiasikan, mendengarkan, dan berinteraksi dengan para ahli, pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. Diselenggarakan oleh Angelo King Institute for Economic and Business Studies of the De La Salle

University and the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) pada 5-6 Maret 2010 yang bertempat di Saint Benilde Hotel.

Konvensi ini difokuskan tentang pembahasan pemulihan, pembangunan, dan ekonomi pasar sosial sebagai respon akibat kondisi nasional di Filipina dan krisis keuangan tahun 2008/2009. Dianggap sebagai salah satu alternatif dalam pemulihan kondisi ekonomi negara, ekonomi pasar sosial dan implikasinya yang menjadi fokus.

Sebagai pembicara utama, Dr. Peter Koppinger, Resident Representative of KAS, menjelaskan tentang ekonomi pasar sosial sebagai elemen kunci dari agenda kebijakan di Filipina. Sistem ekonomi pasar sosial ini telah sukses di Jerman, sehingga diharapkan sistem ini dapat pula di aplikasikan di Filipina. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip dan pedoman dalam keberhasilan ekonomi, perdamaian sosial di negara-negara Asia, serta bagaimana memecahkan masalah rendahnya produktivitas, kurangnya daya saing, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial di Filipina. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga perlu diciptakannya konsep jangka panjang dalam mengembangkan ekonomi pasar sosial dalam versi Filipina (KAS